

PEMBANGUNAN PERTANIAN INKLUSIF DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19



Tjeppy Soedjana

Tim Analisis Kebijakan
Puslitbang Peternakan, Badan Litbang Pertanian
Kementerian Pertanian

20 Mei 2020



Balitbangtan
Kementan

www.litbang.pertanian.go.id
SCIENCE.INNOVATION.NETWORKS



1

PEMBANGUNAN INKLUSIF

1. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional sudah seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif;
2. Berbeda dengan pembangunan yang dilakukan secara eksklusif, yaitu pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan utama yang seringkali menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan;
3. Pembangunan eksklusif menyebabkan tingginya angka pengangguran, angka kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan;
4. Pendekatan ini merupakan pilihan logis dalam mempertahankan produksi, produktifitas, dan konsumsi produk-produk pertanian pada situasi pandemi Covid-19;



Balitbangtan
Kementan

www.litbang.pertanian.go.id
SCIENCE.INNOVATION.NETWORKS



2

4. Pembangunan inklusif mengurangi tingkat kemiskinan dan terwujud karena semua pihak berkontribusi menciptakan **peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan**, secara partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel;
5. Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, menyediakan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, meningkatkan pelayanan dasar publik dan dukungan kebijakan publik yang memadai;
6. Mengembangkan **model pembangunan ekonomi lokal**, dengan **melibatkan secara peran aktif pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat**, yang diimplementasikan dalam bentuk intervensi program dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah, pengembangan perencanaan partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik, serta dukungan usaha kecil dan menengah terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam untuk membangun iklim pembangunan inklusif.



3

SUMBERDAYA USAHA PERTANIAN

1. **Sumber daya alam dan lingkungan** merupakan komponen biotik dan abiotik, yang terdiri dari (a) **Renewable resources**, yaitu komponen yang dapat diperbaharui, kebanyakan adalah komponen abiotik, seperti organisme, tanaman pangan, pakan, dan (b) **Non-renewable resources**, yang tidak dapat diperbaharui, yang sebagian besar merupakan komponen abiotik seperti lahan, air, dan lain sebagainya;
2. **Sumber daya manusia** petani dan peternak yang berperan sebagai manajer dan pemelihara tanaman dan ternak, dimana petani dan peternak dapat memiliki lahan, ternak, dan sumberdaya sendiri, namun ada juga yang tidak memiliki salah satu atau seluruhnya dari sumberdaya usahanya;
3. **Modal** merupakan sumber daya esensial dalam usaha pertanian, karena dibutuhkan untuk membeli input produksi (pakan, tenaga kerja, obat2an) perawatan alat dan mesin pertanian;



4

SUMBERDAYA USAHA PERTANIAN

4. **Teknologi** berpengaruh terhadap laju produksi agar semakin baik dan efisien, walaupun dibutuhkan modal dan biaya perawatannya, sehingga harga produk yang ditawarkan menjadi lebih tinggi daripada produk yang dihasilkan menggunakan teknologi konvensional;
5. Keterampilan **manajemen** sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan proses produksi, yaitu menggunakan prinsip-prinsip ekologi agar lebih produktif dan berkelanjutan;
6. **Institusi/kelembagaan** merupakan sumber daya pertanian yang juga penting karena dapat memajukan ekonomi di perdesaan sebagai wahana menjual produk, meminjam uang untuk modal produksi. Penyuluhan Pertanian juga dibutuhkan untuk mengembangkan produksi dengan memberikan pemahaman mengenai manajemen dan pengolahan yang baik.

DAMPAK PANDEMI COVID-19

1. Pandemi Covid-19 telah mengganggu ketersediaan, distribusi, dan akses terhadap pangan diberbagai negara termasuk Indonesia, sehingga diperkirakan akan terjadi kelangkaan pangan, dan diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangannya;
2. Pandemi Covid-19 juga berpotensi mengganggu rantai pasok pangan antara perdesaan dan perkotaan, ekspor-impor produksi pangan dan input produksi, akses ke pusat pengolahan, dan pasar pangan utama sumber karbohidrat dan protein hewani, yang akhirnya berpengaruh kepada proses produksi dan produktivitasnya;
3. Gangguan ini akan menyebabkan penurunan pendapatan petani dan stabilitas harga yang lebih serius dari biasanya, baik secara geografis maupun pola musim, sehingga menciptakan susana ketidakpastian bagi produsen maupun konsumen, termasuk produksi dan produktivitas pangan;
4. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan domestik di Indonesia, dari sisi produksi dan produktivitasnya, perlu mendapat perhatian serius selama periode pencegahan dan mitigasi resiko dampak Covid-19 saat ini sampai pada saat terjadinya pelandaian kurva penularan;

6. FAO (2020) menjumpai bahwa gangguan wabah memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap produksi pangan dan rantai tata nilainya, termasuk berkurangnya ketersediaan input produksi atau terbatasnya akses terhadap lahan dan pasar;
7. Kondisi seperti ini secara langsung mempengaruhi aktivitas produsen pangan terutama penduduk perdesaan yang termasuk kategori rentan secara fisik dan ekonomi;
8. Pembatasan pergerakan juga membahayakan rantai pasokan input pada saat yang kritis dalam musim yang sedang berjalan, akses tenaga kerja informal pada lahan pertanian, upah, luasan tanam, serta transportasi barang ke tempat atau fasilitas prosesing atau pasar;
9. Industri perunggasan yang membutuhkan sekitar 50% jagung dalam ransum pakannya akan sangat tergantung kepada subsektor pangan yang dalam waktu bersamaan juga terkena dampak pandemi, yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan feed conversion ratio;
10. Produksi daging dan telur unggas komersial yang saat ini menunjukkan kelimpahan pasokannya harus mendapat perhatian agar pemasaran dan harganya tidak berdampak buruk kepada harga pokok produsen, terutama peternak mandiri, sehingga kemampuan pasokan daging dan telur per satuan pakan yang diberikan dapat tetap terjaga;



7

DAMPAK TERHADAP TENAGA KERJA

1. ILO (2020) memperkirakan pandemi Covid-19 berdampak pada pengurangan 6,7 persen agregat jam kerja selama kuartal pertama 2020, atau setara dengan 195 juta tenaga kerja dengan jam kerja penuh;
2. Hal ini berimbas kepada hilangnya sumber pendapatan dan berpotensi meningkatnya kemiskinan, terutama sektor akomodasi, perumahan, manufaktur dan perdagangan, sementara sektor pertanian termasuk dalam kelompok terdampak rendah dan menengah;
3. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan karena imbas pandemi Covid-19, dimana 10,6 persen di antaranya atau sekitar 160 ribu orang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4 persen lainnya karena dirumahkan;
4. Terdapat sebanyak 1,24 juta orang pekerja formal dan 265 ribu orang pekerja informal karena banyak kegiatan produksi yang bergantung pada mesin yang berada di tempat produksi, sementara pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* dan bekerja dari rumah;
5. PHK juga terjadi karena menurunnya pendapatan perusahaan, atau terjadi kerugian akibat berkurangnya penjualan output, kelangkaan bahan baku produksi yang di impor yang menghambat kegiatan industri;



8

6. Penyebaran Covid-19 ke perdesaan juga berisiko terhadap tenaga kerja pertanian yang sebagian besar berumur relatif tua dan rentan terhadap penularan virus. BPS (2013) menunjukkan tenaga kerja berusia 40 tahun sampai dengan di atas 55 tahun mencapai 60 persen;
7. Survei di tingkat mikro (PSEKP 2016) juga menunjukkan bahwa tenaga kerja perdesaan di Jawa 52 % berumur 45-64 tahun, sedangkan tenaga kerja di usaha tani yang berumur \geq 65 tahun terdapat sekitar 9%;
8. Pekerja informal juga berisiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan karena tidak memiliki kontrak kerja maupun perlindungan sosial, seperti halnya di sektor pertanian dan perdesaan pada umumnya baik sebagai wiraswasta, pekerja upahan, dan tenaga kerja keluarga, yang berjumlah lebih dari 80 persen (FAO 2020), dan di negara berkembang terdapat lebih dari 90 persen pekerja pertanian adalah pekerja informal (ILO, 2018);
9. Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap meningkatnya pengangguran dan setengah pengangguran terutama pada pekerja informal sekitar 5,3 juta orang (skenario rendah) dan 24,7 juta orang pada skenario tinggi (ILO, 2019);



9

10. "Lockdown" yang diikuti dengan penutupan berbagai kegiatan bisnis berakibat pada menurunnya output pasar tenaga kerja yang akan bermuara kepada peningkatan kemiskinan dan kerentanan pangan secara nyata;
11. Kegiatan usaha tani dan permintaan tenaga kerja pertanian juga tergantung kepada musim, maka pembatasan mobilitas yang bertepatan dengan musim panen atau musim tanam yang dapat menghilangkan peluang tenaga kerja untuk memperoleh pendapatan;
12. Dampak lebih lanjut adalah mereka akan terjerat hutang kepada rentenir dengan bunga tinggi atau menjual asset, sebagai strategi menanggulangi kebutuhan finansial keluarga, serta meningkatnya tenaga kerja anak di bawah umur karena tidak ada kegiatan sekolah;
13. Di sektor pertanian, pandemic Covid-19 berdampak terhadap tenaga kerja yang melakukan migrasi (umumnya migrasi sirkuler) ke kota, dan tenaga kerja yang tetap tinggal di desa, serta berdampak pada menurunnya remiten tenaga kerja migran;
14. Pekerja migran yang kehilangan sumber penghasilan di kota, dengan adanya kebijakan pembatasan wilayah, berjuang untuk dapat kembali ke desa, padahal di desa mereka mengalami diskriminasi dengan stigma sebagai pembawa virus Covid-19.



10

15. Jika pandemi semakin parah dalam jangka waktu lama, maka ketersediaan bahan pangan akan terganggu dalam jangka waktu menengah atau panjang, karena kapasitas produksi melemah akibat gangguan kesehatan petani, akses input tidak tepat waktu karena transportasi, serta kendala tenaga kerja karena pembatasan mobilitas masyarakat;
16. Penurunan permintaan oleh golongan masyarakat menengah ke bawah yang rentan terkena dampak, akan mempengaruhi kemampuan dan minat produsen untuk berinvestasi dan mengadopsi teknologi, yang dalam jangka menengah panjang akan berdampak pada penurunan produksi dan ketersediaan pangan;
17. Kebijakan pembatasan sosial berakibat pada berkurangnya kegiatan bisnis layanan jasa pangan, seperti restaurant, hotel, dan lainnya, akan berdampak juga pada kehilangan mata pencaharian dan pendapatan pekerja;
18. Gangguan sarana logistik (transportasi, pergudangan, pengemasan dan pengiriman) akan mengganggu distribusi pangan dalam hal kualitas, kesegaran, keamanan pangan serta akses pasar;
19. Keterlambatan dalam satu tahap kegiatan akan berdampak terhadap keseluruhan proses produksi yang lebih lanjut akan berdampak negatif terhadap output yang diproduksi.



11

PENANGANAN DAMPAK

Penanganan dampak dan potensi dampak ekonomi dan sosial dapat dilakukan melalui pendekatan pembangunan pertanian inklusif di perdesaan:

1. Mendekatkan petani pelaku usaha pertanian kepada teknologi inovatif untuk meningkatkan adopsi, perbaikan pendapatan, dan kesejahteraan
2. Jaminan ketersediaan penyediaan bahan pangan pokok;
3. Percepatan ekspor komoditas potensial setempat dalam mendukung keberlanjutan ekonomi;
4. Pengembangan pasar tani di provinsi termasuk pasar online;
5. Jaring pengaman sosial melalui kegiatan padat karya dan fasilitas penyediaan pangan murah;
6. Dukungan terhadap UMKM dan usaha ekonomi informal di sektor pertanian dan
7. Menjamin keberlangsungan usaha pertanian melalui bantuan sarana produksi (alat dan mesin pertanian, input produksi berupa benih/bibit ternak, pupuk dan biaya usaha pertanian) melalui kegiatan padat karya tunai.



12

**TERIMAKASIH ATAS SARAN DAN
PERHATIANNYA**

